

**PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KOMISARIS
INDEPENDEN TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI



Oleh :

AYU MUNAWAROH
NIM 210816059

Dosen Pembimbing :

Dr. Anton Sudrajat, M.A
NIDN. 2021078302

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Munawaroh, Ayu. 2020. Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Anton Sudrajat, M.A

Kata Kunci: Waktu, Laporan Keuangan, Akuntansi.

Penelitian ini menggunakan variabel komite audit dan komisaris independen sebagaimana variabel independen dan dependen adalah *audit report lag* karena variabel tersebut saling berkaitan, dimana ketepatan waktu pengauditan laporan keuangan tidak berjalan dengan baik apabila tanpa peran dari komite audit dan komisaris independen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* baik secara parsial maupun simultan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018.

Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan tahunan milik 14 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018, kemudian ditarik sampel dengan teknik *purposive sampling* didapatkan 12 sampel Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Panin Syariah, BTPN Syariah, Bank Mega Syariah, BJB Syariah, Maybank Syariah, Bank Victoria Syariah. Untuk metode penelitian

menggunakan analisis regresi berganda dengan sebelumnya melakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan kemudian analisis regresi dilanjutkan dengan uji hipotesis dan koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini adalah komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Uji simultan komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap komite audit pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 dengan besarnya pengaruh sebesar 22,6 %.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Ayu Munawaroh
NIM : 210816059
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap *Audit Delay* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 05 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN
Ponorogo



Agung Eko Purwana, S.E, MSI
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anton Sudrajat'.

Dr. Anton Sudrajat, M.A
NIDN. 2021078302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:**

Judul : Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap 'Audit Report Lag Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018

Nama : Ayu Munawaroh

NIM : 210816059

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Agung Eko Purwana, SE., MSI
NIP. 197109232000031002

Penguji I :
Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak
NIP. 197905252003122002

Penguji II :
Dr. Anton Sudrajat, M.A
NIDN. 2021078302

Ponorogo, 02 Maret 2020

Mengesahkan,

Dekan FEBFI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

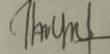
Nama : Ayu Munawaroh
NIM : 210816059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Februari 2019

Penulis



Ayu Munawaroh
NIM. 210816059

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Munawaroh
NIM : 210816059
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2018.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 4 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Ayu Munawaroh
NIM. 210816069

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan perbankan termasuk perbankan syariah merupakan perusahaan sektor keuangan mempunyai tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam menyimpan dan mengelola uang. Jadi, apabila terjadi penundaan pada penyampaian laporan keuangan, maka dapat mempengaruhi relevansi dari laporan keuangan tersebut dan berdampak pada pengambilan keputusan investor. Terjadinya penundaan laporan keuangan dapat diartikan oleh investor sebagai pertanda buruk bagi perusahaan dengan kemungkinan disebabkan oleh tingkat laba yang rendah dan tingkat hutang yang tinggi.¹

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan jembatan informasi antara perusahaan dengan pihak luar. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai informasi oleh investor, calon investor, manajemen, kreditor dan para pengguna lainnya. Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai suatu instrument untuk mengukur kinerja perusahaan. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan

¹ Aryaningsih, Budhiarta, “Pengaruh Total Aset, Tingkat Solvabilitas dan Opini Audit pada Audit Delay”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7 (2014),747

keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan.²

Auditor dituntut untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu untuk menghilangkan citra buruk yang mungkin akan diterima perusahaan maupun kantor akuntan publik. Cepat lambatnya publikasi laporan keuangan (*audit report lag*) akan menimbulkan persepsi para pengguna laporan keuangan untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut bermanfaat. Ketepatan waktu pelaporan (*audit report lag*) keuangan sangatlah dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan seperti manajemen perusahaan, investor, calon investor, karyawan, pemerintah, dan kreditor. Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu akan mengurangi ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pihak investor menginginkan laporan keuangan dipublikasikan secara tepat waktu dan akurat, adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dalam pengambilan keputusan dan bisa berakibat pada reaksi pasar modal. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih memadai harus memperhatikan ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan. Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan (*audit report lag*)

² Mohammad Khoirul Anam, "Determinan yang Mempengaruhi Audit Report Lag: Studi Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1, (2017), 94

kepada publik menjadi salah satu unsur yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan. Pelaporan keuangan yang tepat pada waktunya (*audit report lag*) akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan.³

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12 /PJOK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal tutup buku tahunan.⁴ Artinya, Bank Umum Syariah memiliki batas waktu *audit report lag* selama 90 hari. *Audit report lag* didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Terdapat komponen-komponen yang dapat mempengaruhi *audit report lag* seperti komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan solvabilitas dan profitabilitas⁵ Namun, penelitian ini hanya meneliti tentang komite audit dan komisaris independen.

Audit report lag dipengaruhi oleh sedikit banyaknya jumlah komite audit. Komite audit bertugas untuk

³ Fitri Dwi Jayanti, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan", *Jurnal Akuntansi*, 1, (2018), 27

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 /PJOK.03 Tahun 2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, 10

⁵ Muhammad Rizal Saragih, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas Dan Komite Audit Terhadap Audit report lag", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2, (2018), 354

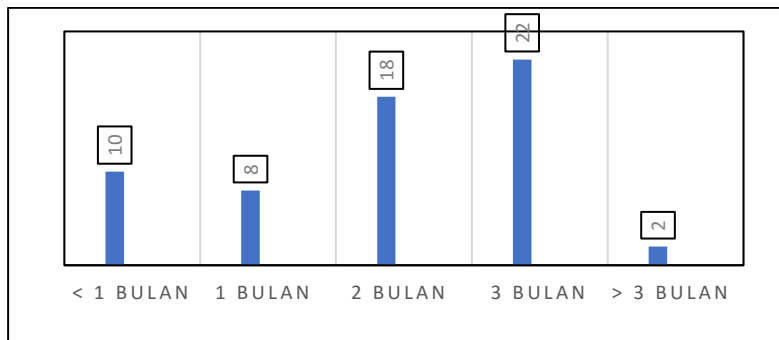
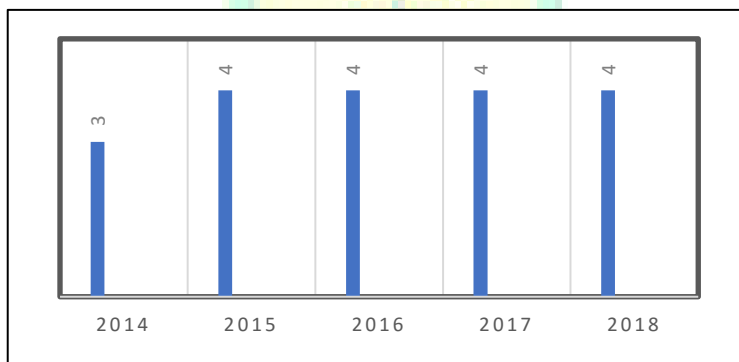
memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Jika, semakin banyak jumlah komite audit, maka *audit report lag* yang dialami semakin singkat, begitu sebaliknya.⁶

Sedikit banyaknya jumlah komisaris independen juga mempengaruhi *audit report lag*. Pengawasan dari dewan komisaris independen membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan manajemen sehingga luas dan waktu pekerjaan audit dapat berkurang. Dewan Komisaris Independen tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen perusahaan sehingga dengan masuknya dewan komisaris independen pada perusahaan maka dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Standar tata kelola perusahaan dapat tercapai dengan baik dengan adanya dewan komisaris yang independen, aktif dan berwawasan luas. Jika, semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin singkat *audit report lag*, begitu sebaliknya.⁷

Berdasarkan hasil observasi terhadap laporan keuangan Bank Umum Syariah periode tahun 2014-2018 terkait dengan *audit report lag* dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

⁶ Ibid., 354

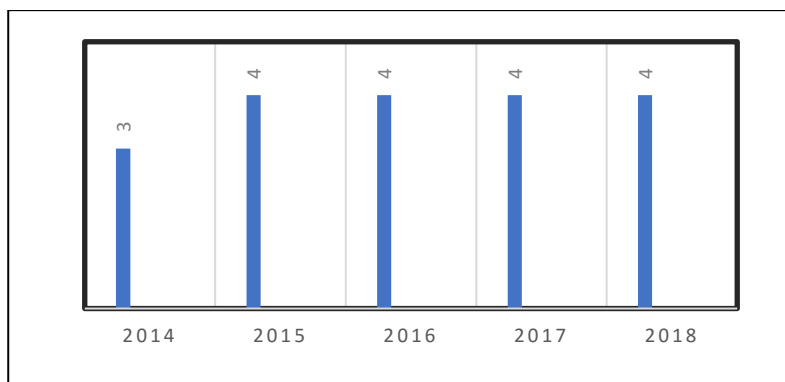
⁷ Yenny Dwi Handayani, “ Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Auditor Tenure, Auditor Spesialisasi Industri Terhadap Auditor Report Lags (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014)”, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 2, (2016), 252

Grafik 1.1 Audit Report Lag Periode Tahun 2014-2018⁸**Grafik 1.2 Jumlah Komite Audit Periode Tahun 2014-2018⁹**

⁸ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

⁹ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

Grafik 1.3 Jumlah Komisaris Independen Periode Tahun 2014-2018¹⁰



Berdasarkan grafik di atas mayoritas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 mengalami *audit report lag* selama 3 bulan bahkan ada yang lebih dari 3 bulan. Setiap periode jumlah komite audit di Bank Umum Syariah cenderung stabil, tentunya sedikit banyak yang berpengaruh terhadap lamanya *audit report lag*.¹¹ Sama seperti komite audit, jumlah komisaris independen di Bank Umum Syariah juga cenderung stabil setiap periode, sehingga masih ditemukan beberapa Bank Umum Syariah yang memiliki *audit report lag* yang panjang.¹²

¹⁰ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

¹¹ Bank Umum Syariah Yang Memiliki *Audit report lag* Panjang Adalah Bank Muamalat 150 hari pada tahun 2015, Bank BTPN 96 Hari pada tahun 2014, BRIS 90 Hari pada tahun 2018

¹² Bank Umum Syariah Yang Memiliki *Audit Report Lag* Panjang Adalah Bank Muamalat 150 hari pada tahun 2015, Bank BTPN 96 Hari pada tahun 2014, BRIS 90 Hari pada tahun 2018

Berdasarkan kesenjangan pada teori di atas, maka peneliti terdorong untuk membahas analisis tentang pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang dibuktikan dengan penelitian empiris dengan judul “Pengaruh Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018”. Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengurangi atau mencegah serta memberi wawasan lebih terhadap lamanya *audit report lag* serta meminimalisir keterlambatan tersebut berdasarkan faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang asih dan wawasan terutama bagi IAIN Ponorogo sebagai masukan untuk pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya tentang ilmu komite audi, komisaris independen dan *audit report lag*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah di Indonesia untuk sarana

- diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi dalam *audit report lag*.
- b. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen agar penyajian laporan keuangan auditan dapat dihasilkan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, instrumen pengumpulan data teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian atau hasil dari pengujian data serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Audit Report Lag*

Menurut Gilang Satrya Ramadhan (2018) *Audit report lag* merupakan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan tahunan, sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditan.¹ Menurut Yogi Ginajar (2018) *Audit report lag* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit yang dihitung dari tanggal akhir pelaporan keuangan perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit.²

Menurut Siti Akhrani Isnania (2018) *Audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dapat dilihat dari selisih waktu antara tanggal tutup tahun buku dengan tanggal pelaporan auditor dalam laporan keuangan auditan.³ Menurut Mewa J.O. Menajang (2019) *Audit*

¹ Gilang Satrya Ramadhan, “ Analisis Determinan Audit Report Lag”, *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, ISSN: 2597-6826, (2018), 24

²Yogi Ginajar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, ISSN : 2356-3923, (2018), 22

³ Siti Akhrani Isnania, “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report”, *Akuntansi*, ISSN:24606561,(2018), 40

report lag adalah periode penyelesaian audit dimulai dari tanggal penutupan buku perusahaan sampai tanggal yang tercantum dalam laporan audit. Keterlambatan dalam publikasian laporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya masalah pada laporan keuangan perusahaan.⁴

Ni Komang Ari Sumartini dan Ni Luh Sari Widhiyani (2014) *Audit report lag* yaitu rentang waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal dikeluarkannya opini auditor dapat diketahui lamanya waktu penyelesaian audit.⁵ Menurut Reza Hanafi Lubis (2019) *Audit report lag* adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan sejak tanggal tutup perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang sudah tertera pada laporan auditor independen. Perbedaan waktu yang sering dinamai *audit report lag* adalah perbedaan antara tanggal laporan lamanya waktu penyelesaian audit yang dikerjakan oleh auditor. Semakin lama auditor dalam

⁴ Mewa J.O. Menajang “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag (Studi Kasus Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia), *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, 3 (2019), 3479

⁵ Ni Komang Ari Sumartini dan Ni Luh Sari Widhiyani, “ Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran Kap Dan Laba Rugi Pada Audit Report Lag,” *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, 397

menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin lama *audit report lag*, begitu juga sebaliknya.⁶ Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam Isnania (2018), terdapat tiga kriteria keterlambatan pelaporan keuangan, yaitu : a) *Prelemery Lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh perusahaan; b) *Auditor's Report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; c) *Total Lag*, yaitu jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di perusahaan.⁷

Semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama *audit report lag* yang terjadi. Apabila laporan keuangan disajikan terlalu lama maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan.⁸ Seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang dilakukan oleh

⁶ Reza Hanafi Lubis, "Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit report lag pada Perusahaan LQ 45", *Jurnal Akuntansi dan Pembelajaran*, ISSN: 23017384, 2, (2019), 45

⁷ Siti Akhrani Isnania, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report", 41

⁸ Silvia Angruningrum, Made Gede Wirakusuma "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi Kap Dan Komite Audit Pada Audit report lag", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, (2013), 254

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Laporan tahunan adalah salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar.⁹

Kurangnya informasi tentang perusahaan dari pihak luar menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi yang tidak sesuai. Salah satu cara untuk mengurangi informasi yang tidak sesuai adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan

⁹ Fitri Novalia, Marsellisa Nindito, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Economic Value Added Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan", 7

akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.¹⁰

Menurut Alkhatib dan Marji (2012) dalam penelitiannya Dewa Ayu Adelia Pratiwi dan Ketut Muliarta (2019) mengatakan *audit report lag* yang lama akan berdampak buruk bagi pemegang saham karena akan meningkatkan tidak seimbangya informasi dan menurunkan relevansi dari informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemegang saham, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Sebaliknya *audit report lag* yang tepat waktu akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pengguna laporan keuangan dan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan.¹¹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12 /PJOK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90

¹⁰ Fitri Novalia, Marsellisa Nindito, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Economic Value Added Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 2, (2016), 6

¹¹ Dewa Ayu Adelia Pratiwi, Ketut Muliarta “Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Audit report lag Terhadap Pergantian Auditor”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, 2, (2019), 1052

hari setelah tanggal tutup buku tahunan.¹² Semakin pendek *audit report lag*, maka semakin besar nilai kegunaan dan manfaat yang pengguna dapatkan dari laporan keuangan auditan. Di sisi lain, semakin panjang *audit report lag* mengindikasikan semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaannya, sehingga menunda waktu penerbitan laporan keuangan auditan. Pentingnya publikasi laporan keuangan auditan yang tepat waktu membuat faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag* menjadi objek signifikan untuk diteliti. Faktor tersebut bukan hanya dari sisi auditor yang merupakan pihak eksternal perusahaan, tetapi juga dari sisi internal perusahaan. Hal ini karena bagaimanapun juga auditor melaksanakan pekerjaannya dengan bergantung pada informasi yang ada dan tersedia dari perusahaan.¹³

Menurut Muhammad Faishal dan P.Basuki Hadiprajitno (2015), faktor yang mempengaruhi *audit report lag* salah satunya adalah komisaris independen, bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan tercipta monitoring yang lebih efektif pada manajerial.¹⁴ Sedangkan

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 /PJOK.03 Tahun 2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, 10

¹³ Jasset Joy, Nurul Fachriyah, "Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Report Lag", *Jurnal Akuntansi*, (2018), 3.

¹⁴ Muhammad Faishal, P.Basuki Hadiprajitno, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governanceterhadap Audit Report Lag", *Diponegoro Journal Of Accounting*, ISSN(Online): 2337-3806, 2, (2015), 2

menurut Siti Akhrani Isnania (2018), faktor yang mempengaruhi *audit report lag* adalah komite audit, karena dinyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit maka *audit report lag* yang dialami semakin pendek.¹⁵ Faktor lain yang mempengaruhi *audit report lag* adalah ukuran perusahaan, dikarenakan ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan dan faktor yang mempengaruhi *audit report lag* selanjutnya adalah solvabilitas, hal ini disebabkan karena bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama.¹⁶

2. Komite Audit

Komite audit menurut Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

¹⁵ Siti Akhrani Isnania, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report", 41

¹⁶ Muhammad Rizal Saragih, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas Dan Komite Audit Terhadap Audit report lag", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2, (2018), 354

Komite Audit (Pasal 1) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.¹⁷

Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih yang tanggungjawabnya termasuk membantu auditor tetap dari manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau terkadang sebanyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.¹⁸ Menurut Siti Akhrani Isnania (2018), Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan bertanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama. Komite audit dihitung menggunakan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan dengan keseluruhan anggota komite audit.¹⁹

Ningsih dan Widhiyani (2015) mengatakan dalam jurnalnya bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk komite audit minimal

¹⁷ Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 2

¹⁸ Hiro Tugiman, *Komite Audit* (Bandung : PT.Eresco Anggota IKAPI), 6

¹⁹ Siti Akhrani Isnania, “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report”, *Akuntansi*, ISSN:24606561,(2018), 42

dua orang untuk satu perusahaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya *audit report lag* yang panjang. Karena, anggota komite audit yang bekerja di suatu perusahaan dapat menentukan berapa lama *audit delay* yang akan dihasilkan.²⁰ Tugas pokok dari komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.²¹

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, anggota komite audit paling kurang terdiri dari:

- a. Seorang komisaris independen;
- b. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan

²⁰ I Gusti Ayu Puspita Sari Ningsih, Ni Luh Sari Widhiyani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Operasi, Solvabilitas, Dan Komite Audit Pada Audit", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, 12 (2015), 484

²¹ Ni Made Sunarsih, "Pengaruh kualitas Auditor, Jumlah Komite Audit Dan Pendidikan Ketua Komite Audit Terhadap Eranings Management Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Volume*, ISSN : 2528-1216, 2 (2017), 6

- c. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.²²

Keanggotaan komite audit di Indonesia beragam disesuaikan dengan ukuran atau besar kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya. Namun, jumlah keanggotaan tiga sampai lima merupakan jumlah yang cukup ideal. Salah satu tugas komite audit berkordinasi kepada auditor eksternal dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara wajar. Jumlah keanggotaan komite audit yang lebih besar akan mampu bekerja lebih efektif untuk mengawasi jalannya pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Jadi, apabila semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan dan seakin cepat dalam proses audit.²³

3. Komisaris Independen

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

²²Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, 18

²³I Gede Aditya Cahya Gunarsa., Igam Asri Dwija Putri, “ Pengaruh Komite Audit, Independensikomite Audit, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lagdi Perusahaan Manufaktur,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 302-8556, 2 (2017), 1679

saham atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi, hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.²⁴

Menurut Maria Fransisca Widyati (2013) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali dan anggota dewan komisaris lainnya, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Perusahaan harus mempunyai jumlah komisaris independen yang secara profesional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 50% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris.²⁵ Komisaris independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite pada Bank yang sama.²⁶

²⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009, 4

²⁵ Maria Fransisca Widyati, "Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1 (2013), 5

²⁶ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2

Menurut Firmansyah (2016) Komisaris independen merupakan lembaga pengawasan yang bekerja untuk kepentingan perseroan secara umum, dia tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham, tetapi harus mempertahankan kepentingan perseroan terhadap siapa saja, serta menjaga ditegakannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan.²⁷

Menurut Edwardus Randy Ekha Mahendra dan Siti Mutmainah (2013), Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan independensi dewan komisaris. Dewan komisaris independen bisa lebih menekan manajemen untuk melaporkan informasi secara tepat waktu. Hal tersebut akan memberikan pengaruh yang berlawanan, ketika independensi dewan komisaris rendah, maka tekanan terhadap manajemen untuk melaporkan informasi secara tepat waktu juga akan menurun.²⁸

Dewan komisaris independen akan membuat proses pengawasan berjalan dengan efektif dan berdasarkan fakta bahwa ketika perusahaan di

²⁷ Firmansyah, Dudi, "Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)", *e-Proceeding of Management*, ISSN : 2355-9357, 2 (2016), 1553

²⁸ Edwardus Randy Ekha Mahendra, Siti Mutmainah, "Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Informasi Perusahaan Melalui Internet", *Diponegoro Journal Of Accounting*, ISSN (online): 2337-3806, (2013), 4

dominasi oleh dewan komisaris yang tidak independen, maka permainan antara manajer dan anggota dewan komisaris dapat terjadi. Hal ini akan membahayakan bagi proses transparansi dari perusahaan tersebut. Dewan komisaris yang independen menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan tersebut.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pendukung adalah penelitian dengan salah satu atau lebih variabel yang sama dengan penelitian ini :

No	Nama Peneliti	Temuan	Perbedaan	Persamaan
1.	Lestari, Rasyidi dan Susanti (2017). ³⁰	Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Reputasi KAP, Opini	-Tidak terdapat variable opini audit dan variabel	-Variabel Komite Audit -Variabel Dependen

²⁹ Debbi Chyntia Ovami, “Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Real Estate Dan Property”, *Jurnal Kitabah*, 2, (2018), 8

³⁰ Candra Sri Lestari, Ali Rasyidi, Widya Susanti, “Pengaruh Reputasi Kap, Opini Audit Dan Komite Audit Terhadap Audit report lag Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3 (2017).

		Audit dan Komite Audit secara simultan mempunyai pengaruh terhadap <i>audit report lag</i> pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.	Reputasi KAP -Objek Penelitian -Teori komite audit berdasarkan OJK	<i>Audit report lag</i>
2.	Gunarsa Dan Dwija Putri (2017). ³¹	Berdasarkan penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa komite audit, independensi komite audit, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> , hal ini menunjukkan	-Tidak terdapat variabel profitabilitas, independensi komite audit -Objek penelitian -Teori komite audit berdasarkan OJK	-Variabel komite audit -Variabel Dependen <i>Audit report lag</i>

³¹ I Gede Aditya Cahya Gunarsa, Igam Asri Dwija Putri, "Pengaruh Komite Audit, Independensi Komite Audit, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag di Perusahaan Manufaktur".

		semakin banyak jumlah komite audit dan independensi komite audit semakin tinggi serta profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tidak akan mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.		
3.	Rizkyllah (2018). ³²	Pada penelitian ini Opini Audit berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> atau <i>Audit report lag</i> . Komite Audit Berpengaruh	-Tidak terdapat variabel opini audit, umur perusahaan -Objek penelitian. -Teori komite audit	-Variabel komite audit -Variabel Dependen <i>Audit Report Lag</i> .

³² Permana Rizkyllah, "Pengaruh Opini Audit, Komite Audit, Dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2016", Karya Ilmiah, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2018).

		terhadap Audit Report Lag. Dan umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> .	berdasarkan OJK	
4.	Abadi (2017). ³³	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Komite audit berpengaruh signifikan	-Tidak terdapat variabel umur perusahaan, kesulitan keuangan, masa perikatan audit -Objek Penelitian -Teori komite audit dan komisaris independen menurut OJK dan PBI	- Variabel Komisaris Independen, komite audit. - Variabel Dependen <i>Audit report lag</i>

³³ Muhammad Gilang Abadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit report lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)", Karya Ilmiah (Jambi: Universitas Jambi, 2017).

		<p>terhadap <i>audit report lag</i>. kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>, masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>. Dan umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit secara simultan berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p>		
5.	Ramadhani (2018). ³⁴	Hasil dari analisis	-Tidak terdapat	-X1 Komite Audit

³⁴ Khalida Nurdiana Ramadhani, "Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Opini Audit, dan Reputasi Kantor Akuntansi

	<p>berganda yang telah dilakukan adalah opini audit dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>. Sedangkan komite audit dan komisaris independen tidak ditemukan berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p>	<p>variable opini audit dan variabel Reputasi KAP -Objek Penelitian -Teori komite audit dan komiaris independen menurut OJK dan PBI</p>	<p>- X2 Komisaris Independen -Variabel Dependen <i>Audit report lag</i></p>
--	--	---	---

Penelitian ini mengkaji tema tentang “Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2018”, yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya. Namun penelitian ini mengembangkan dari segi teori *audit report lag*, penelitian terdahulu menggunakan teori aturan dari Bursa Efek

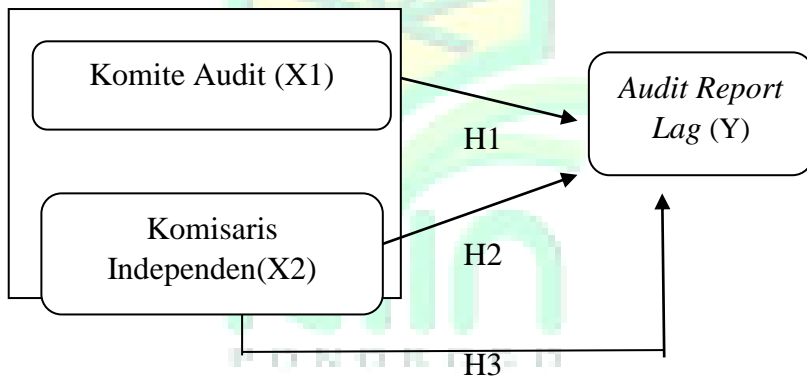
Publik Terhadap Audit report lag ada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Katholik Parahrayang, 2018).

Indonesia. Penelitian ini juga telah mengkaji variabel independen yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel komite audit dan komisaris independen, namun penelitian ini mengembangkan berdasarkan konsep komite audit dan komisaris independen menggunakan teori dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam penelitian terdahulu menggunakan teori dari Bursa Efek Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji pengaruh komite audit dan komisaris independen, terhadap *audit report lag*. Pada kerangka pemikiran ini ditunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh komite audit. Jika semakin banyak anggota dalam komite audit suatu perusahaan

maka semakin singkat *audit report lag*. *Audit report lag* juga dipengaruhi oleh komisaris independen. Jika jumlah komisaris independen banyak maka tekanan terhadap manajemen untuk melaporkan informasi secara tepat waktu akan meningkat. Demikian juga jika secara bersama terjadi penambahan anggota komisaris independen dan komite audit berdampak pada singkatnya *audit report lag*.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Serta merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.³⁵

1. Pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.³⁶ Sedangkan *audit report lag* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit yang dihitung dari tanggal akhir pelaporan keuangan perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit.³⁷ Jika semakin banyak

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta), 95.

³⁶Undang-Undang No.55 /POJK.04 Tahun 2015, 2.

³⁷Yogi Ginanjar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, ISSN : 2356-3923, (2018), 22

jumlah komite audit suatu perusahaan maka semakin singkat *audit report lag*. Begitu sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka semakin lama *audit report lag*.

Menurut Siti Akhrani Isnania (2018), faktor yang mempengaruhi *audit report lag* adalah komite audit, karena dinyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit maka *audit report lag* yang dialami semakin pendek.³⁸ Berdasarkan penelitian Lusiana (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.³⁹ Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ha₁: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Ho₁: Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Bank Umum Syariah Indonesia.

2. Pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag*.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan

³⁸ Siti Akhrani Isnania, “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report”, 41

³⁹ Lusiana, “Pengaruh Firm Size, Profitability, Audit Committee Size, Dan Auditor Opinion Terhadap Audit report lag Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015”, *Majalah Ilmiah*, ISSN 1412-5854, (2017), 193.

keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi, hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.⁴⁰ Sedangkan *audit report lag* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit yang dihitung dari tanggal akhir pelaporan keuangan perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit.⁴¹ Jika semakin banyak jumlah komisaris independen suatu perusahaan maka semakin singkat *audit report lag*. Begitu sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah komisaris independen maka semakin lama *audit report lag*.

Menurut Amalia Indah Apriliana (2016) Komisaris Independen adalah salah satu faktor yang mempengaruhi *audit report lag*. Berdasarkan penelitiannya komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.⁴² Semakin banyak jumlah anggota komisaris independen maka semakin singkat *audit report lag*. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009, 4

⁴¹Yogi Ginanjar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”, 22

⁴²Amalia Indah Apriliana, “Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan (Studi Di Perusahaan Manufaktur Pada Indeks Saham Syariah Indonesiaperiode 2013-2015)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016), 4

Ha₂: Komisarisindependen berpengaruhsignifikan terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Ho₂: Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah Indonesia.

3. Pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag*.

Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih yang tanggungjawabnya termasuk membantu auditor tetap dari manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau terkadang sebanyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.⁴³ Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.⁴⁴ Sedangkan *audit report lag* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit yang dihitung dari tanggal akhir pelaporan

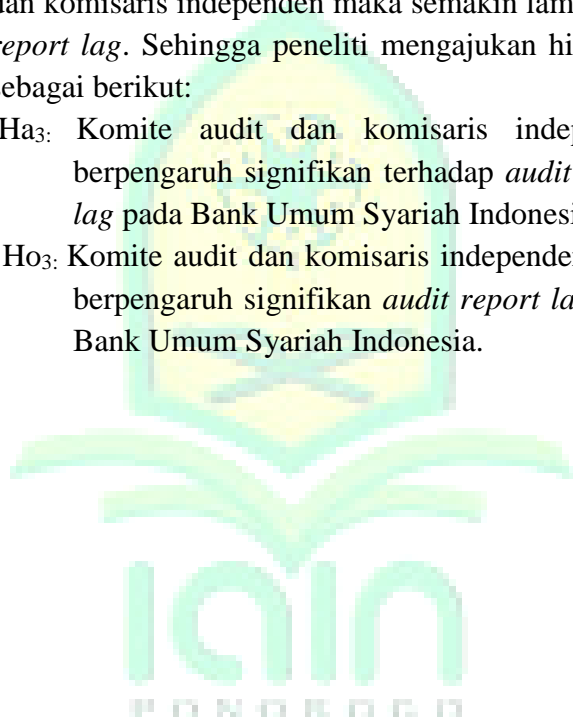
⁴³ Hiro Tugiman, *Komite Audit*, 6.

⁴⁴ Maria Fransisca Widyati, “Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan”, 5.

keuangan perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit.⁴⁵ Hubungan antara komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* adalah semakin banyak jumlah komite audit dan komisaris independen maka semakin singkat *audit report lag* dan semakin sedikit jumlah komite audit dan komisaris independen maka semakin lama *audit report lag*. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Komite audit dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Ho₃: Komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan *audit report lag* pada Bank Umum Syariah Indonesia.



⁴⁵Yogi Ginanjar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, ISSN : 2356-3923, (2018), 22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan matang-matang hal-hal yang akan dilakukan, serta dapat pula dijadikan dasar penilaian oleh peneliti terhadap kegiatan penelitian. Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan berbentuk angka dan analisis statistik.¹

Metode kuantitatif disebut juga metode konfirmatif, karena metode ini cocok apabila digunakan untuk pembuktian. Disebut kuantitatif karena data penelitian yang digunakan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, untuk meneliti populasi atau sampel, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data yang bersifat kuantitatif, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²

B. Jenis Data Penelitian

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun

¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), 100.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung : Alfabeta, 2013), 12

suatu informasi. Dilihat dari dimensi waktu terdapat tiga jenis penelitian sebagai berikut :

1. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan tidak dalam satu waktu melainkan dalam rangkaian waktu. Dan akan sangat berguna apabila ingin memahami terjadinya perubahan.
2. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam suatu waktu titik tertentu dalam artian waktu yang digunakan terbatas, sehingga tidak bisa melihat terjadinya perubahan.
3. Data panel adalah data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time*.³

Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag* peneliti menggunakan data panel. Karena laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan milik 12 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan kurun waktu lima tahun terakhir yang telah diaudit. Mengambil data lima tahun terakhir karena data akan lebih akurat dan akan lebih mudah dilihat bagaimana fluktuasi dalam setiap tahunnya.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga

³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), 38.

diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya.⁴ Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang dibahas yang meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel sebab, atau variabel yang mengondisikan terjadinya perubahan dalam variabel lain.⁵ Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu komite audit (X1) dan komisaris independen (X2). Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang merespon perubahan dalam variabel independen.⁶ Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *audit report lag* (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

a) *Audit Report Lag*

Audit report lag adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit yang dihitung dari tanggal akhir pelaporan keuangan perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit.⁷

⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 108

⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 186.

⁶ *Ibid.*, 185

⁷ Yogi Ginanjar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)", *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, ISSN : 2356-3923, (2018), 22

b) Komite Audit

Komite audit menurut Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Pasal 1) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.⁸ Variabel komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit pada Bank Umum Syariah pada suatu periode.

c) Komisaris Independen.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi, hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.⁹ Variabel komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan jumlah

⁸ Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 2

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, 4.

komisaris independen pada Bank Umum Syariah pada suatu periode.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit maupun individu dalam ruang lingkup yang diteliti.¹⁰ Suatu penelitian tentunya memiliki keterbatasan dalam menghadirkan sumber informasi ataupun subjek penelitian. Penelitian yang hasil dapat digeneralisasikan tentunya memiliki perjalanan proses pengambilan sampel yang sesuai dengan proporsi. Siapa saja yang akan diteliti, dan berapa banyaknya populasi, dan siapa saja yang menjadi sasaran langsung pengumpulan data sampel atau responden. Dengan demikian, yang dimaksud populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki banyak dan luas.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi seluruh data laporan keuangan tahunan milik empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah diaudit oleh auditor independen periode tahun 2014-2018.

¹⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 74.

¹¹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 137.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Definisi lain, sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan persyaratan tertentu.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti memilih sampel yang memiliki kriteria sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) selama 5 tahun, yaitu sebanyak 60 laporan keuangan. Kriteria sampling pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan *highlight* tata kelola perusahaan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2014-2018. Sedangkan untuk kriteria pengambilan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

¹² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 74.

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel¹³

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia	14
2.	Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan <i>highlight</i> tata kelola perusahaan secara lengkap selama tahun 2014-2018	(2)
3.	Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria dari sampel	12

Berdasarkan tabel diatas dengan teknik *purposive sampling* di dapatkan jumlah sampel 12 Bank Umum Syariah dengan periode 2014-2018. Dengan adanya hal tersebut, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 60 sampel yang berupa laporan keuangan tahunan dari masing-masing Bank Umum Syariah tersebut. Sedangkan daftar sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2.

¹³ Website Bank Syariah

Tabel 3.2 Sampel Penelitian¹⁴

No	Nama Bank	Sumber Data
1.	BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
2.	BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
3.	Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id
4.	Bank Muamalat	www.bankmuamalat.co.id
5.	Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
6.	Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
7.	Bank BTPN Syariah	www.btponsyariah.co.id
8.	Bank Bukopin Syariah	www.syariahbukopin.co.id
9	Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
10	Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
11	Maybank Syariah	www.maybanksyariah.co.id
12	BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian sangat berpengaruh dalam melakukan analisis data penelitian nantinya. Sedangkan sumber data merupakan faktor

¹⁴ Website Masing-Masing Bank Syariah.

penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data adalah subjek penelitian tempat data menempel. Sumber data berupa benda gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan data sekunder, karena data yang diperlukan merupakan laporan keuangan tahunan. Sehingga peneliti menggunakan data tidak langsung atau tidak dari nasabah ataupun pegawai bank, melainkan dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dari dua belas Bank umum Syariah dan bersumber dari situs atau *website* Bank Umum Syariah tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari suatu penelitian adalah mendapatkan

¹⁵Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:CV.Andi Offset, 2010), 43.

¹⁶Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian* (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2011), 44.

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.¹⁷

Dalam penelitian ini cara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, surat-surat, gambar, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat memberi peluang kepada para peneliti untuk hal-hal pada masa silam.¹⁸ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menyimpulkan dan mendokumentasikan laporan keuangan tahunan yang terdapat pada Bank Umum Syariah untuk mengetahui mengenai *audit report lag*, komite audit dan komisararis independen.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas. Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam modal regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2017), 08.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329

baik adalah regresi normal.¹⁹ Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk menguji variabel apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.²⁰

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji tentang ada tidaknya korelasi antara data pengamatan. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya preblem autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji *Durbin Watson*. Kriteria pengujian *Durbin-Watson* dapat dilihat pada tabel 3.3.²¹

Tabel 3.3 Kriteria Pengujian Autokorelasi

Durbin-Watson	Simpulan
Jika $dU \leq dW \leq (4-dU)$	Tidak ada Autokorelasi
Jika $dW \leq dL$	Ada Autokorelasi Positif
Jika $dW \geq (4-dL)$	Ada Autokorelasi Negatif
Jika $dU \leq dW \leq dL$ atau $(4-dU) \leq dW \leq (4dL)$	Autokorelasi Tidak Dapat Ditetapkan

¹⁹ Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2009), 126.

²⁰ Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 92.

²¹ Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, 122.

c. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolonieritas.²² Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier.²³ Untuk menguji multikolonieritas dengan menggunakan patokan nilai VIF dan Tolerance. Dalam melihat kasus multikolonieritas adalah dengan melihat VIF dan Tolerance. Apabila VIF suatu model < 10 dan Tolerance $> 0,1$ maka model tersebut dinyatakan bebas dari masalah multikolonieritas. Jika nilai VIF > 10 dan Tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolonieritas.²⁴

d. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah varians variabel dalam model yang tidak sama. Jika varians dari

²² Ibid., 119.

²³ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2011), 81.

²⁴ Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, 119.

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.²⁵ Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji glejser dengan hasil probabilitas dinyatakan signifikan jika nilai signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%. Uji glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut :²⁶

$$|e| = b_1 + b_2x_2 + v$$

Keterangan:

$|e|$ = Nilai absolute dari yang dihasilkan dari regresi model

b = Koefisien

x = Variabel penjelas

2. Analisis Data Penelitian

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.²⁷ Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag*. Selain itu

²⁵ Ibid., 124.

²⁶ Adryan Setyadharma, *Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 16.0*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2010), 8.

²⁷ Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*, 250.

juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya sebagai berikut :²⁸

$$Y_{it} = a + b_1 X1_{it} + b_2 X2_{it} + e$$

Keterangan:

Y = *Audit report lag*

X1 = Komite Audit

X2 = Komisaris Independen

b1-b2 = Koefisien Regresi X1, X2

a = Konstanta

e = Standar Error

b. Uji Hipotesis

1) Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen (Y) dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%.²⁹

Adapun pengambilan kesimpulan:

Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima .

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak

Atau dengan cara

Jika thitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.

²⁸ Ibid., 250.

²⁹ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, 45.

Jika t hitung $< t$ tabel atau $-t$ hitung $> -t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.³⁰

2) Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun cara pengambilan kesimpulan:³¹

Jika $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Atau dengan cara

F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima.

F hitung $> F$ tabel maka H_0 ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Jika R^2 semakin besar atau nilai R mendekati 1, maka prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka prosentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 160.

³¹ *Ibid.*, 160

independen semakin rendah. Koefisien determinasi (R^2) pada persamaan regresinya linier, dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi/ proporsi keragaman variabilitas total di sekitar nilai tengah y yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase).³²



³² Ibid., 164

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi seluruh data laporan keuangan tahunan milik 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang telah diaudit oleh auditor independen periode tahun 2014-2018. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti memilih sampel yang memiliki kriteria sesuai dengan topik penelitian. Kriteria sampling pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang menerbitkan laporan keuangan dan *highlight* tata kelola perusahaan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2014-2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komite audit dan komisaris independen. Dengan sampel yang digunakan adalah duabelas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) periode tahun 2014-2018. Sedangkan daftar sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sampel Bank Umum Syariah¹

No	Nama Bank
1.	BRI Syariah
2.	BNI Syariah
3.	Bank Syariah Mandiri
4.	Bank Muamalat
5.	Bank Panin Syariah
6.	Bank Mega Syariah
7.	BTPN Syariah
8.	Bank Bukopin Syariah
9	Bank Jabar Banten Syariah
10	Bank Victoria Syariah
11	Maybank Syariah
12	BCA Syariah

Adapun deskripsi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. BRI Syariah

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapat izin dari Bank Indonesia (BI), BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada

¹ Website Bank Syariah

tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk masuk ke dalam PT. Bank BRI Syariah dengan proses *spin off* yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Untuk memperkuat citranya pada tahun 2016 BRI Syariah melakukan rebranding logo untuk menumbuhkan *brand equity* BRI Syariah. Selain itu BRI Syariah juga dinobatkan sebagai bank syariah ke tiga terbesar berdasarkan jumlah aset. Selain itu, pengembangan demi pengembangan terus dilakukan untuk kepentingan nasabah dan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta UU yang berlaku di Indonesia.²

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Bank BRISyariah secara terus menerus dan konsisten melaksanakan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aktivitas bisnis dan operasional sehingga diperoleh tingkat kesehatan bank yang sangat baik. Dalam melakukan hal ini, Bank BRISyariah senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku. Penilaian penerapan GCG Bank BRISyariah berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan GCG, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang

² BRI Syariah, Annual Report, www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 18 Januari 2020 , jam 18.50).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan tersebut, Bank BRISyariah setiap semester dan tahunan melakukan *self assessment* untuk mengukur tata kelola struktur, proses dan hasil, kemudian melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

2. BNI Syariah

Perjalanan BNI Syariah bermula dari dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya juga disebut BNI Induk) pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010

³ Ibid.,

tanggal 21 Mei 2010. Terwujudnya pendirian ini juga didukung oleh faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.⁴

Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik di setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.255 pegawai di mana proses pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung dengan

⁴ BNI Syariah, Annual Report, www.bnisyariah.co.id , (diakses pada tanggal 18 Januari 2020 , jam 18.53).

pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008. Hingga kini, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 68 Kantor Cabang, 168 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 24 Payment Point. Selain itu, nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (Sharia Channelling Office/SCO) yang tersebar di 1.490 outlet di seluruh wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset.⁵

Struktur dan mekanisme GCG di BNI Syariah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, benchmark GCG di peers group yang memiliki reputasi bagus, serta praktik yang berlangsung di perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, maka struktur GCG BNI Syariah utamanya terdiri dari RUPS serta Dewan Komisaris dan Direksi yang posisinya sejajar dan memiliki fungsi saling *check and balances*. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, masing-masing komite Dewan Komisaris bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan

⁵ Ibid.,

Komisaris. Sedangkan Direksi terutama Direktur Risiko dan Kepatuhan dibantu oleh jajaran manajemen bank yang bertugas untuk mengelola, mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi GCG yang dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan divisi-divisi yang bersentuhan dengan GCG.⁶

BNI Syariah meyakini bahwa semangat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesionalitas, serta Kewajaran dan Kesetaraan, akan meningkatkan kualitas perusahaan. Kualitas tersebut utamanya dapat dinilai dari keberdayaan fungsi dan kemandirian organ perusahaan, keputusan-keputusan manajemen yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta nilai perusahaan yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang tercermin di setiap kegiatan usaha merupakan perwujudan visi BNI Syariah untuk menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, serta misi BNI Syariah untuk menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

⁶ Ibid.,

BNI Syariah meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang menyeluruh di setiap jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya BNI Syariah dalam mewujudkan sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

3. BCA Syariah

Perkembangan perbankan Syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si., PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT Bank BCA Syariah.⁷ Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB Menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

⁷ BCA Syariah, Annual Report, www.bcasyariah.co.id , (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, 19.00).

Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke PT BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, PT Bank BCA Syariah (BCAS) resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.⁸

Dalam menjalankan strategi bisnis, BCAS telah mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan melaksanakan tata kelola perusahaan, kepatuhan, pengelolaan risiko yang terukur (*Good Corporate Governance, Compliance, dan Risk Management*) seperti yang tertuang dalam persyaratan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) secara konsisten merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan nasabah dan pemegang saham. Penerapan prinsip GCG di seluruh jenjang organisasi telah mendukung upaya Bank dalam mempertahankan reputasi

⁸Ibid.,

sekaligus memastikan tercapainya kinerja usaha yang sehat.

Dewan Komisaris senantiasa memantau terselenggaranya prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – GCG) pada seluruh jenjang organisasi dengan mengevaluasi hasil *self-assessment* GCG dan mendorong penyempurnaan pelaksanaan GCG yang mengacu kepada peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis Bank. BCAS percaya bahwa penerapan praktik-praktik GCG merupakan aset penting dalam menciptakan budaya organisasi yang kokoh dan unggul guna meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah.⁹

4. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank

⁹ Ibid.,

Muamalat Indonesia merupakan inisiator bisnis keuangan syariah lainnya antara lain; Asuransi syariah pertama (Asuransi Takaful), Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), *multifinance* syariah pertama (Al-Ijarah Indonesia Finance). Bank Muamalat Indonesia mendapatkan ijin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994 dan merupakan perusahaan publik namun tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia telah melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah di tahun 2003.¹⁰

Bank Muamalat Indonesia memiliki serangkaian produk dan layanan, antara lain; produk *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia, produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diseluruh *merchant* VISA dalam dan luar negeri yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta

¹⁰Bank Syariah Mandiri, Annual Report, www.syariahamandiri.co.id, (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam19.13).

layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*.

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki struktur formal untuk komite-komite Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Perusahaan. Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengangkat seorang anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 3 September 2015 untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Muamalat Indonesia. Namun demikian kami menyadari bahwa keanggotaan komite-komite Komisaris masih terdapat kekurangan dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk melengkapinya.¹¹

5. BTPN Syariah

Beroperasinya BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12, tidak terlepas dari perjalanan bisnis syariah yang mulai dirintis sejak 2008 oleh BTPN melalui divisi Unit Usaha Syariah. Kemudian sejak 2010, dikembangkan lebih lanjut untuk fokus melayani segmen pasar pra-sejahtera produktif dengan nama Tunas Usaha Rakyat. Perkembangan pesat yang terjadi di rentang 2010 hingga saat ini adalah salah satu alasan yang menjadi dasar

¹¹ Ibid.,

pertimbangan manajemen BTPN, yang kemudian menjadi pemegang saham terbesar dan induk usaha, untuk meningkatkan level UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).¹²

Berbeda dengan eksistensi bank syariah lainnya, BTPN Syariah memberi perhatian pada pemberdayaan nasabah perempuan dari keluarga pra-sejahtera di pedesaan. Caranya memberikan program pembiayaan yang digabung dengan program pemberdayaan. Program terintegrasi ini memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok nasabah perempuan untuk mendapatkan akses, produk, layanan perbankan serta program pemberdayaan dengan membangun empat perilaku unggul, yakni: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Memberikan perhatian pada pemberdayaan perempuan inilah, menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh BTPN Syariah. Dengan mengemban visi “Menjadi Bank Syariah Terbaik untuk Keuangan Inklusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia”, keunikan tersebut menjadi keunggulan BTPN Syariah yang tidak dimiliki bank berbasis syariah lainnya di Indonesia. Sehingga, bila dilihat secara seksama, keunikan-keunikan yang dimiliki BTPN Syariah antara lain;¹³ Pertama, satu-satunya bank

¹² BTPN Syariah , Annual Report, www.btpnsyariah.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 19.30).

¹³ Ibid.,

syariah di Indonesia yang menerapkan prinsip keuangan inklusif (*Financial Inclusion*) melayani segmen keluarga pra-sejahtera produktif yang selama ini bukan merupakan segmen utama bank. Kedua, satu-satunya bank yang memprioritaskan pada pemberdayaan perempuan. Ketiga, satu-satunya bank yang lebih dari 90% karyawannya adalah wanita. Keempat, satu-satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA untuk membangun karir di bank. Kelima, bank yang mampu melahirkan generasi karyawan bank baru, yaitu karyawan bank yang melayani golongan masyarakat pra-sejahtera (*productive poor banker*), dimana karyawan ini kami sebut Melati Putih Bangsa.¹⁴

Masa awal menjadi Bank Umum Syariah, BTPN Syariah memiliki organisasi yang lengkap sebagai sebuah bank. Organ-organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Dewan Komisaris, Direksi, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi telah dibentuk, berikut perangkat-perangkatnya antara lain; *roadmap* program, Tata Kelola Perusahaan, berbagai kebijaksanaan, pedoman, dan tata tertib kerja, tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi, serta pedoman dan tata tertib kerja sebagai landasan kerja komite-komite tersebut. Ini

¹⁴ Ibid.,

dilakukan sebagai perwujudan dalam menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Semua kebijakan risiko, sistem dan prosedur serta parameter risiko juga telah disusun, dilengkapi, dan diterapkan di segenap tingkat operasional.¹⁵

6. Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk merubah logo BSMI ke bentuk logo sister company-nya, yakni PT Bank Mega Tbk, namun dengan skema warna yang berbeda. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat

¹⁵ Ibid.,

dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.¹⁶

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) KEMENAG RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia. Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Bank bekerjasama dengan *MoneyGram International* dalam hal pengiriman uang secara cepat.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank Mega Syariah berpedoman pada lima prinsip dasar. Yang pertama adalah transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam

¹⁶ Bank Mega Syariah, Annual Report, www.megasyariah.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 19.45).

proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Kelima, profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Terakhir adalah kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

7. Bank Syariah Mandiri

Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah. Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan

¹⁷ Ibid.,

syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah. Pada tanggal 25 Oktober 1999 Gubernur Bank Indonesia menyetujui kegiatan BSB menjadi BUS dan menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999.¹⁸

8. Bank Panin Syariah

PT. Bank Panin Dubai Syariah didirikan berdasarkan akta perseroan bank terbatas No. 12 Tanggal 8 Januari 1972. Semenjak itu Panin Dubai Syariah melakukan perubahan nama berturut-turut sampai tanggal 3 Agustus 2009 diganti menjadi PT. Bank Panin Syariah. Selanjutnya pada tahun 2013 nama PT. Bank Panin Syariah diubah menjadi PT. Bank Panin Syariah Tbk. Pada tahun 2016 nama PT. Bank Panin Syariah Tbk. diubah menjadi PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai *Islamic* Bank sebagai pemegang saham. Sejak masuk pada industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik dengan mengembangkan aset dan menambahkan kepercayaan nasabah menggunakan produk pembiayaan dan penyimpanan dananya.

¹⁸Bank Syariah Mandiri, Annual Report, www.syahiahmandiri.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 20.00).

Implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) telah di jalankan secara konsisten oleh Panin Bank Syariah. Hal itu tidak hanya mengikuti kepatuhan terhadap regulasi namun juga terkait transparansi dan keterbukaan pengelolaan perusahaan sehubungan IPO yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan seluruh nasabah, masyarakat dan pemangku kepentingan.¹⁹

9. Maybank Syariah

PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdiri pada Januari 1995 dengan nama PT Bank Maybank Indocorp yang merupakan bank joint venture Indonesia-Malaysia pertama. PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. Tahun 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi bank syariah komersial dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) dan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia tanggal 23 September 2010, Maybank Syariah memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada tanggal 1 Oktober 2010. Pemegang saham PT Bank Maybank Syariah

¹⁹ Bank Panin Syariah, Annual Report, www.paninbanksyariah.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 20.15).

Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (99%) dan PT Prosperindo (1%).²⁰

Maybank Syariah merupakan anak perusahaan dari Malayan Banking Berhad (Maybank), sebuah grup keuangan yang didirikan dan berkedudukan di Malaysia. Sebagai sebuah grup keuangan terbesar di Malaysia, Maybank sangat menjunjung tinggi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi seluruh entitas dalam grupnya, termasuk Maybank Syariah. Bagi Maybank Syariah, *Corporate Governance* bukan semata-mata pernyataan kepatuhan tetapi juga merupakan komitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi untuk integritas bisnis, etika, dan profesionalisme pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh grup Maybank. Sementara bagi Maybank Syariah, komitmen grup tersebut menjadi landasan pokok untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG di seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Maybank Syariah.²¹

10. Bank Bukopin Syariah

PT. Bank Bukopin Syariah sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dimulai dengan masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin Tbk. Proses akuisis tersebut berlangsung bertahap sejak

²⁰ Maybank Syariah, Annual Report, www.maybanksyariah.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 20.20).

²¹ Ibid.,

tahun 2005-2008. Pada tahun 2009 penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Bukopin Syariah ke dalam perseroan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI) melalui surat Nomor. 11/842/DpbS Tanggal 30 Juni 2009. PT. Bank Bukopin Syariah mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008 berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-5618 HT. 01.01 Tanggal 11 Maret 1990, dengan modal dasar sebesar Rp. 3.000.000.000.000. Sampai akhir Desember 2017, perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 11 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas.²²

Struktur tata kelola perusahaan pada bank Bukopin Syariah terdiri atas perangkat-perangkat kelembagaan yang terdiri atas organ utama dan organ pendukung sebagai berikut:

- a. Organ Utama: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); DPS; Dewan Komisaris; Direksi.
- b. Organ Pendukung: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi & Nominasi; Sekretaris Perusahaan; SKAI.

11. Bank BJB Syariah

²²Bank Bukopin Syariah, Annual Report, www.syariahbukopin.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 20.25)

Tanggal 20 Mei 2000 adalah awal berdirinya bank bjb syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Di tahap awal pembentukannya tersebut, bank bjb syariah masih berstatus sebagai Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam perkembangan selanjutnya, Divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertansformasi menjadi sebuah Bank Umum Syariah setelah 10 (sepuluh) tahun beroperasi setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Menurut pandangan Manajemen perusahaan induk tersebut, transformasi ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah.²³

Secara resmi bank bjb syariah berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317. AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah dan

²³ Bank BJB Syariah, Annual Report, www.bjbsyariah.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 20.45)

terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.Kn. Hal ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Bank BJB syariah secara resmi mendapatkan Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbs tertanggal 30 April 2010 dan memulai usahanya pada tanggal 6 Mei 2010. Sebelum mendapatkan ijin tersebut, terlebih dahulu dilakukan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang menjadi cikal bakal Bank BJB syariah.

Dalam melaksanakan GCG-nya, bank BJB Syariah memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari GCG yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*). Untuk susunan anggota Dewan Komisaris bank BJB Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen.²⁴

12. Bank Victoria Syariah

²⁴ Ibid.,

PT Bank Victoria Syariah (selanjutnya disebut perseroan) didirikan pada tahun 2010 merupakan hasil dari konversi dari Bank Swaguna berdasarkan izin operasional dari Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia no. 12/8/KEP.GBI/ DpG tanggal 10 Februari 2010 dan efektif beroperasi pada tanggal 1 april 2010. Bank Victoria Syariah didirikan dengan modal disetor sebesar Rp. 110 .000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah) dengan pemegang saham utama adalah PT Bank Victoria International Tbk. Sebagai bentuk komitmen serius pada sisi permodalan, PT Bank Victoria International Tbk sebagai pemegang saham pengendali pada bulan Juni 2014 telah menambah kepemilikan sahamnya dengan memberikan tambahan setoran modal sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sesuai dengan hasil Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RuPSLB) nomor 12 tanggal 30 Juni 2014. Tambahan modal tersebut efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁵

PT. Bank Victoria Syariah menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolok ukur untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan

²⁵ Bank Victoria Syariah, Annual , www.bankvictoriasyariah.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 21.00)

usahanya, Bank secara berkesinambungan senantiasa meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia no. 12/13/DPbS tanggal 30 april 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank umum Syariah Dan unit usaha Syariah, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan serta memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi komitmen utama bagi Bank Victoria Syariah dalam menjalankan aktivitas bisnis. Bank Victoria Syariah menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan dan secara berkesinambungan senantiasa meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.²⁶

B. Hasil Pengujian Deskripsi

Data dalam penelitian terdiri dari data komite audit, komisaris independen, dan *audit report lag* 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2014-2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Komite Audit

²⁶ Ibid.,

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.²⁷ Data komite audit Bank Umum Syariah (BUS) di periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Komite Audit Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2018²⁸

No	Nama Bank	Komite Audit					Rata-rata	Ket
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	BRI Syariah	4	4	4	4	4	4.0	Tetap
2	BNI Syariah	5	4	4	4	3	4.0	Turun
3	BCA Syariah	3	3	3	3	3	3.0	Tetap
4	Bank Muamalat	3	4	4	3	4	3.6	Naik
5	BTPN Syariah	4	5	5	4	4	4.4	Tetap
6	Bank Mega Syariah	3	3	3	3	3	3.0	Tetap
7	Bank Syariah Mandiri	6	7	6	6	6	6.2	Tetap
8	Bank Panin Dubai Syariah	3	3	3	3	3	3.0	Tetap
9	Maybank Syariah	3	4	3	4	3	3.4	Tetap
10	Bank	2	3	3	3	2	2.6	Tetap

²⁷ Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 2

²⁸ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

	Bukopin Syariah							
11	BJB Syariah	3	4	4	4	5	4.0	Naik
12	Bank Victoria Syariah	3	3	3	3	3	3.0	Tetap
	Rata-Rata	3.5	3.9	3.7	3.7	3.5	3.6	Naik

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah komite audit pada 12 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018 secara umum mengalami kenaikan. Rata-rata komite audit tahun 2014-2018 sebesar 3,6. Peningkatan jumlah komite audit ini disebabkan karena perusahaan setiap tahunnya terjadi penambahan komposisi komite audit, karena komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan terutama berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata komite audit paling banyak selama tahun 2014-2018 adalah Bank Syariah Mandiri yang rata-ratanya berjumlah 6.2 karena Bank Mandiri Syariah memiliki kinerja pengawasan yang lebih baik dan membutuhkan banyak anggota komite audit untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit .

Bank Umum Syariah yang memiliki jumlah komite audit yang paling sedikit selama tahun 2014-2018 adalah Bank Bukopin Syariah yang rata-ratanya berjumlah 2.6 karena bank Bukopin Syariah

yang baru berdiri jadi aktivitas pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan audit belum semaksimal seperti bank syariah yang lain.

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi, hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.²⁹ Data komisaris independen Bank Umum Syariah (BUS) di periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Komisaris Independen Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2018³⁰

No	Nama Bank	Komisaris Independen					Rata-rata	Ket
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	BRI Syariah	5	5	5	5	4	4.8	Turun
2	BNI Syariah	3	3	4	4	4	3.6	Naik
3	BCA Syariah	3	3	3	3	3	3.0	Tetap
4	Bank Muamalat	5	5	5	4	3	4.4	Turun
5	BTPN Syariah	3	3	5	4	4	3.8	Naik
6	Bank Mega Syariah	3	3	3	4	3	3.2	Tetap
7	Bank Syariah Mandiri	5	5	5	4	4	4.6	Turun
8	Bank Panin Syariah	3	3	4	4	3	3.4	Tetap

²⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009, 4

³⁰ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

9	Maybank Syariah	3	3	3	3	3	3.0	Tetap
10	Bank Bukopin Syariah	3	4	4	4	4	3.8	Naik
11	BJB Syariah	3	4	4	3	3	3.4	Tetap
12	Bank Victoria Syariah	4	3	3	3	3	3.2	Turun
Rata-Rata		3.5	3.7	4.0	3.7	3.5	3.7	Naik

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah komisaris independen pada 12 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018 secara umum mengalami kenaikan. Rata-rata komisaris independen tahun 2014-2018 berjumlah 3,7. Peningkatan jumlah komisaris independen ini disebabkan oleh penambahan komposisi komisaris independen setiap tahunnya. Karena, komisaris independen bisa lebih menekan manajemen untuk melaporkan informasi secara tepat waktu. Hal tersebut akan memberikan pengaruh yang berlawanan, ketika independensi dewan komisaris rendah, maka tekanan terhadap manajemen untuk melaporkan informasi secara tepat waktu juga akan menurun.

Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata komisaris independen paling banyak selama tahun 2014-2018 adalah BRI Syariah yaitu berjumlah 4,8. Hal ini disebabkan karena bri syariah memiliki kinerja yang efektif untuk meningkatkan

pengawasan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu.

Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata komisaris independen yang paling sedikit selama tahun 2014-2018 adalah BCA Syariah dan Maybank Syariah yaitu berjumlah 3,0 hal ini disebabkan karena BCA Syariah dan Maybank Syariah kurang meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu.

3. *Audit Report Lag*

Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku sampai tanggal diterbitkannya laporan audit. Pengukuran *audit report lag* secara kuantitatif yaitu dari tanggal penutupan tahun buku (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen.³¹ Data *audit report lag* Bank Umum Syariah di periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Perkembangan *Audit Report Lag* Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2018³²

No	Nama Bank	Audit Report Lag					Rata-rata	Ket
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	BRI Syariah	63	53	48	40	89	58.6	Naik
2	BNI Syariah	35	29	30	52	32	35.6	Turun

³¹ Arizal Latif Fiatmoko, Anisykurlillah, Indah "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit report lag pada Perusahaan Perbankan," *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765 AAJ 4 (1) (2015), 4.

³² Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

3	BCA Syariah	16	15	74	18	25	29.6	Turun
4	Bank Muamalat	89	150	48	76	67	86.0	Turun
5	BTPN Syariah	96	51	39	21	22	45.8	Turun
6	Bank Mega Syariah	66	88	83	85	51	74.6	Turun
7	Bank Syariah Mandiri	26	22	23	22	21	22.8	Turun
8	Bank Panin Dubai Syariah	33	46	48	59	46	46.4	Naik
9	Maybank Syariah	88	89	86	86	87	87.2	Tetap
10	Bank Bukopin Syariah	57	29	55	82	63	57.2	Naik
11	BJB Syariah	79	25	27	17	25	34.6	Turun
12	Bank Victoria Syariah	86	56	40	64	53	59.8	Turun
Rata-Rata		61.2	54.4	50.0	51.8	48.4	53.1	Turun

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata *audit report lag* pada 12 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014-2018 secara umum semakin singkat pada setiap tahunnya. Mayoritas Bank Umum Syariah mengalami *audit report lag* selama 3 bulan. Hal ini disebabkan karena perusahaan Bank Syariah ingin lebih meningkatkan kualitas laporan keuangannya, agar tidak terjadi *audit report lag* yang semakin lama semakin panjang, karena apabila terjadi penundaan pada penyampaian laporan keuangan, maka dapat mempengaruhi relevansi dari laporan keuangan tersebut dan

berdampak pada pengambilan keputusan investor.

Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata *audit report lag* paling lama selama tahun 2014-2018 terjadi pada Maybank Syariah yaitu pernah mengalami kerugian secara berturut-turut selama tahun 2015-2017, karena Maybank Syariah terjadi hambatan dalam laporan keuangannya sehingga dalam proses pengauditan laporan keuangannya lama.

Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata *audit report lag* paling sedikit selama tahun 2014-2018 adalah Bank Syariah Mandiri, karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang telah lama berdiri di Indonesia di banding bank syariah yang lain, sehingga Bank Syariah Mandiri memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, jadi dalam pengauditan laporan keuangan tidak membutuhkan waktu yang lama.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk melihat data dari komite audit, komisaris independen dan *audit report lag* berdasarkan mean, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi. Statistik komite audit, komisaris independen dan *audit report lag* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif³³
Descriptive Statistics

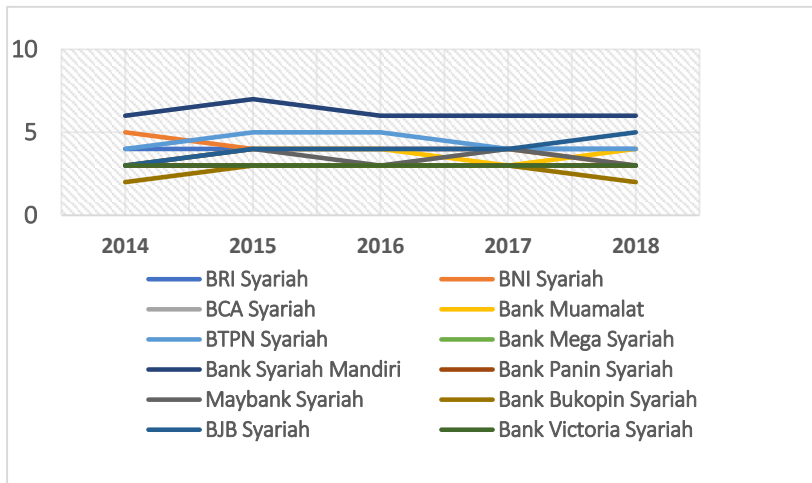
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	60	2.00	7.00	3.8000	1.16153
Komisaris Independen	60	3.00	6.00	3.8833	.95831
Audit report lag	60	15.00	150.00	53.1833	27.81994
Valid N (listwise)	60				

a. Komite Audit

Data komite audit Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 memiliki jumlah minimal yaitu 2,00 dan nilai maksimal yaitu 7,00. Sedangkan untuk rata-rata komite audit seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2017 yaitu sebesar 3,8. Dan untuk standar deviasi komite audit periode tahun 2014-2018 yaitu 1,16 yang menunjukkan variasi komite audit dalam penelitian ini relatif tinggi. Grafik komite audit di Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

³³ Data diolah SPSS

Grafik 4.1 Komite Audit Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018³⁴



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah komite audit terbanyak Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri tahun 2015 sebanyak 7 orang dan jumlah komite audit paling rendah dimiliki oleh bank Bukopin Syariah tahun 2014 dan 2018 sebanyak 2 orang.

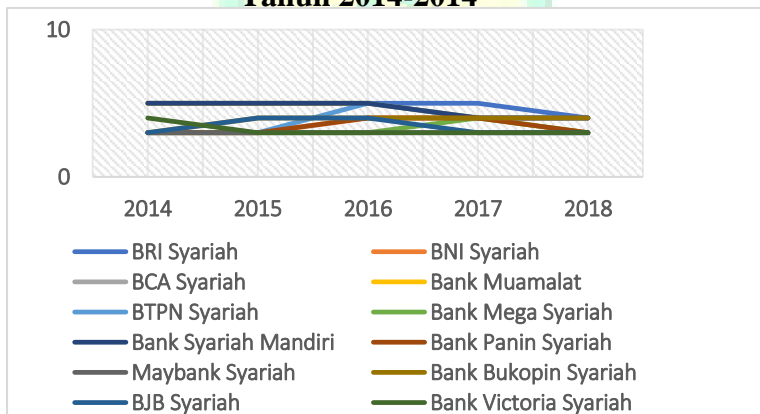
a. Komisaris Independen

Data komisaris independen Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 memiliki jumlah minimal yaitu 3,00 dan nilai maksimal yaitu

³⁴ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

6,00. Sedangkan untuk rata-rata komisaris independen seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2017 yaitu sebesar 3,9. Dan untuk standar deviasi komisaris independen periode tahun 2014-2018 yaitu 0,95 yang menunjukkan variasi komisaris independen dalam penelitian ini relatif tinggi. Grafik komisaris independen di Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Grafik 4.2 Komisaris Independen Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018³⁵



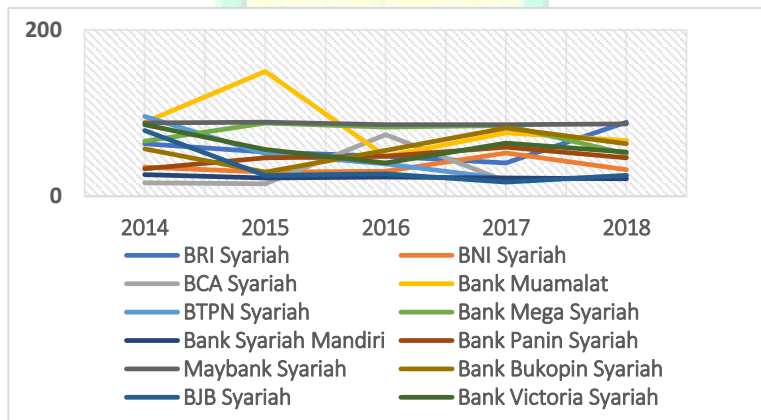
Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah komisaris independen Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 stabil.

b. Audit Report Lag

³⁵ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

Data *audit report lag* Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 memiliki jumlah minimal yaitu 15,00 dan nilai maksimal yaitu 150,00. Sedangkan untuk rata-rata *audit report lag* seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 yaitu sebesar 53,1. Dan untuk standar deviasi *audit report lag* periode tahun 2014-2018 yaitu 27,8 yang menunjukkan variasi *audit report lag* dalam penelitian ini relatif tinggi. Grafik *audit report lag* di Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Grafik 4.3 Audit Report Lag Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018³⁶



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa *audit report lag* paling lama Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018 dimiliki oleh bank Muamalat tahun 2015 yaitu selama 150

³⁶ Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

hari dan *audit report lag* paling singkat dimiliki oleh BCA Syariah tahun 2015 yaitu selama 15 hari.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam modal regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi normal.³⁷ Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Normalitas³⁸
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98290472
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.125
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.971
Asymp. Sig. (2-tailed)		.303
a. Test distribution is Normal.		

Pada tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji normalitas pada tabel one-sample kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai

³⁷ Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2009), 126

³⁸ Data diolah SPSS

Asymp sig 0,303 > 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji tentang ada tidaknya korelasi antara data pengamatan. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi.³⁹ Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi⁴⁰

Model Summary^b

M o d e l	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.476 ^a	.226	.199	24.89474	1.594
a. Predictors: (Constant), Komisaris Independen, Komite Audit					
b. Dependent Variable: Audit report lag					

Pada tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji autokorelasi pada tabel model summary diperoleh nilai $dW = 1,594$ kemudian dicari nilai dU dan dL pada nilai $n = 60$ dan $k = 2$. Diperoleh nilai $dU = 1,615$ $dL = 1,514$. Sehingga nilai $dW \leq dU \Leftrightarrow 1,594 \leq 1,615$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif. Karena uji autokorelasi mengalami masalah, maka peneliti

³⁹ Ibid., 126

⁴⁰ Data diolah SPSS

melakukan penyembuhan masalah autokorelasi dengan cara melakukan transformasi persamaan regresi menjadi data Lag. Hasil dari perbaikan masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi⁴¹

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.409 ^a	.167	.138	24.30304	1.888
a. Predictors: (Constant), Komisar Independen, Komite Audit					
b. Dependent Variable: Audit report lag					

Pada tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji autokorelasi setelah perbaikan pada tabel model summary diperoleh nilai $dW = 1,888$, kemudian dicari nilai dU dan dL pada nilai $n = 60$ dan $k = 2$. Diperoleh nilai $dU = 1,615$, $dL = 1,514$. Sehingga nilai $dU \leq dW \leq (4dU) \Leftrightarrow 1,615 \leq 1,888 \leq (4-1,615 = 2,384)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

c. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak

⁴¹ Data diolah SPSS

terjadi multikolonieritas.⁴² Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier.⁴³ Untuk menguji multikolonieritas dengan menggunakan patokan nilai VIF dan Tolerance. Dalam melihat kasus multikolonieritas adalah dengan melihat VIF dan Tolerance. Apabila VIF suatu model < 10 dan Tolerance $> 0,1$ maka model tersebut dinyatakan bebas dari masalah multikolonieritas. Jika nilai VIF > 10 dan Tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolonieritas.⁴⁴ Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Multikolonieritas⁴⁵

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	37.756	12.560		3.006	.004		
1 Komite Audit	-8.556	3.225	-.338	-2.653	.010	.902	1.109
Komisaris Independen	9.917	3.515	.359	2.822	.007	.902	1.109

a. Dependent Variable: Audit report lag

⁴² Ibid., 119

⁴³ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2011), 81

⁴⁴ Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, 119

⁴⁵ Data diolah SPSS

Pada Tabel 4.9 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji multikolonieritas pada tabel coefficients diperoleh data komite audit memiliki nilai VIF sebesar 1,109 dan Tolerance sebesar 0,902. Dan komisariss independen memiliki nilai VIF sebesar 1,109 dan Tolerance sebesar 0,902. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

d. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah varians variabel dalam model yang tidak sama. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.⁴⁶ Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas⁴⁷

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20.465	7.707		2.655	.010
Komite Audit	1.572	1.979	.110	.795	.430
Komisaris Independen	-2.146	2.157	-.137	-.995	.324

a. Dependent Variable: abrs

⁴⁶ Ibid., 124

⁴⁷ Data diolah SPSS

Pada tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji heterokedastisitas pada tabel coefficients diperoleh data komite audit memiliki nilai sig sebesar 0,430 dan komisaris independen memiliki nilai sig sebesar 0,324. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.⁴⁸ Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag*. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya sebagai berikut :⁴⁹

$$Y_{it} = a + b_1 X1_{it} + b_2 X2_{it} + e$$

Keterangan:

Y = *Audit report lag*

X1 = Komite Audit

X2 = Komisaris Independen

b1-b2 = Koefisien Regresi X1, X2

a = Konstanta

⁴⁸ Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*, 250

⁴⁹ Ibid., 250

e = Standar Error

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

Tabel 4.11 Analisis Regresi Berganda⁵⁰

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	37.756	12.560		3.006	.004
Komite Audit	8.556	3.225	-.338	-2.653	.010
Komisaris Independen	9.917	3.515	.359	2.822	.007

a. Dependent Variable: Audit report lag

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.11 di atas maka diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + b_1X1_{it} + b_2X2_{it} + e$$

$$Y = 37,756 + 8,556 + 9,917$$

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 37,756 menunjukkan bahwa jika variabel komite audit dan komisaris independen nilainya adalah 0, maka *audit report lag* Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 37,756 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

⁵⁰ Data diolah SPSS

2. Koefisien regresi komite audit sebesar 8,556 menunjukkan bahwa jika komite audit mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka *audit report lag* mengalami peningkatan sebesar 8,556 satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara komite audit dengan *audit report lag*. Semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin singkat *audit report lag* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
3. Koefisien regresi komisaris independen sebesar 9,917 menunjukkan bahwa jika komisaris independen mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka *audit report lag* mengalami peningkatan sebesar 9,917 satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara komisaris independen dengan *audit report lag*. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin singkat *audit report lag* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

4. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%.⁵¹ Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari

⁵¹ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, 45

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.⁵² Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Uji T⁵³
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	37.756	12.560		3.006	.004
Komite Audit	-8.556	3.225	-.338	-2.653	.010
Komisaris Independen	9.917	3.515	.359	2.822	.007

a. Dependent Variable: Audit report lag

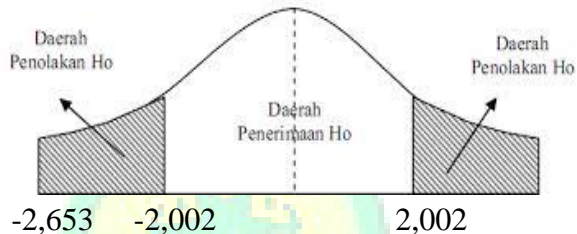
a) Pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*.

Pada tabel coefficients di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel komite audit sebesar -2,653 dengan sig sebesar 0,010. Pada $\alpha = 5\%$ (karena pengujian dua sisi sehingga $0,05 : 2 = 0,025$) maka diperoleh nilai derajat kebebasan ($df = n - k - 1$ atau $60 - 2 - 1 = 57$ (dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 57 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Oleh karena nilai t_{hitung} sebesar $-2,653 < t_{tabel}$ sebesar -2,002

⁵² Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 72.

⁵³ Data diolah SPSS

atau nilai sig 0,010 < 0,05, maka H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima. Sehingga komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Bank Umum Syariah di Indonesia. Grafik uji hipotesis adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Uji t Variabel Komite Audit

Berdasarkan grafik di atas variabel komite audit memiliki nilai t_{hitung} -2,653 > t_{tabel} -2,002 berada di daerah yang diasir dengan nilai sig 0,010 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima. Sehingga komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

b) Pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag*

Pada tabel coefficients di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel komisaris independen sebesar 2,822 dengan sig sebesar 0,007. Pada $\alpha = 5\%$ (karena pengujian dua sisi sehingga $0,05:2 = 0,025$) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df $n-k-1$ atau $60-2-1 = 57$

(dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 57 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Oleh karena nilai t_{hitung} sebesar $2,822 > t_{tabel}$ sebesar 2,002 atau nilai sig $0,007 < 0,05$, maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Sehingga komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Bank Umum Syariah di Indonesia. Grafik uji hipotesis adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Uji t Variabel Komisaris Independen

Berdasarkan grafik di atas variabel komisaris independen memiliki nilai t_{hitung} $2,822 > t_{tabel}$ 2,002 berada di daerah yang diasir dengan nilai sig $0,007 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Sehingga komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

5. Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun cara pengambilan kesimpulan:⁵⁴

Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Atau dengan cara

$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima.

$F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak.

Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Uji F⁵⁵

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	10337.339	2	5168.669	8.340	.001 ^b
1 Residual	35325.645	57	619.748		
Total	45662.983	59			

a. Dependent Variable: Audit report lag

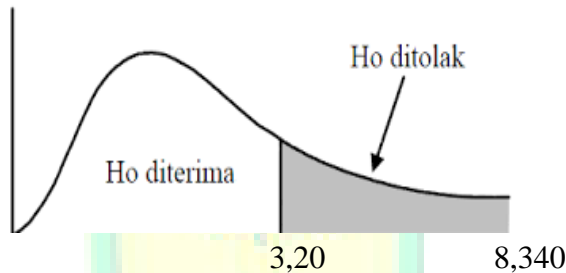
b. Predictors: (Constant), Komisararis Independen, Komite Audit

Berdasarkan tabel 4.12 di atas hasil uji F pada tabel anova diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,340 dengan nilai sig sebesar 0,001 pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df_1) sebesar 2 dan derajat kebebasan (df_2) sebesar $n-k-1$ atau $60-2-1 = 57$ (dimana k merupakan jumlah variabel independen), maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Data diolah SPSS

3,20. Oleh karena nilai F_{hitung} sebesar 8,340 > F_{tabel} sebesar 3,20 atau nilai sig 0,001 < 0,05 maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Komite audit dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Grafik uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Uji F

Berdasarkan grafik di atas nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 8,340 > 3,20 dan nilai sig 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya komite audit dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Jika R^2 semakin besar atau nilai R mendekati 1, maka prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) semakin tinggi. Jika R^2

semakin kecil, maka prosentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen semakin rendah.⁵⁶ Hasil dari koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi⁵⁷

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.476 ^a	.226	.199	24.89474
a. Predictors: (Constant), Komisaris Independen, Komite Audit				
b. Dependent Variable: Audit report lag				

Berdasarkan tabel 4.14 di atas hasil koefisien determinasi pada tabel model summary diperoleh nilai R^2 sebesar 0,226 atau 22,6%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh Komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* sebesar 22,6%. Sedangkan untuk sisanya 77,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Pembahasan

Hasil uji statistik pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode

⁵⁶ Ibid., 164

⁵⁵ Data Diolah SPSS

tahun 2014-2018 dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Hipotesis	Hasil Regresi	Uji t	Keterangan
Pengaruh komite audit terhadap <i>audit report lag</i>	Koefisien regresi variabel komite audit sebesar 8,556. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara komite audit dengan <i>audit report lag</i> . Semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin singkat <i>audit report lag</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Variabel komite audit untuk nilai $t_{hitung} -2,653 < t_{tabel} -2,002$ berada di daerah yang diasir dengan nilai sig $0,010 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap komite audit di Bank Umum Syariah di Indonesia
Pengaruh komisaris independen terhadap <i>audit report lag</i>	Koefisien regresi variabel komisaris independen sebesar 9,917. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara komisaris independen dengan <i>audit</i>	Variabel komisaris independen untuk nilai $t_{hitung} 2,822 > t_{tabel} 2,002$ berada di daerah yang diasir dengan nilai sig $0,007 < 0,05$.	Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> di Bank Umum Syariah di Indonesia

	<p><i>report lag</i></p> <p>Semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin singkat <i>audit report lag</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>	<p>Maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima.</p>	
<p>Pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap <i>audit report lag</i></p>	<p>Berdasarkan grafik di atas nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $8,340 > 3,20$ dan nilai sig $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya komite audit dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> di Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>		
<p>Koefisien determinasi (R^2)</p>	<p>Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,226 atau 22,6%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh Komite audit dan komisaris independen terhadap <i>audit report lag</i> sebesar 22,6%. Sedangkan untuk sisanya 77,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.</p>		

1. Pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*

Hasil uji regresi untuk variabel komite audit memiliki koefisien 8,556 bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah, dimana semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin singkat *audit report lag* pada oleh Bank Umum

Syariah (BUS) di Indonesia. Sedangkan berdasarkan uji t memiliki nilai $t_{hitung} 3,368 > t_{tabel} 2,002$ dengan nilai sig $0,010 < \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima sehingga komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* karena menurut data riil total rata-rata komite audit periode tahun 2014-2018 mengalami kenaikan, hal ini ditunjukkan dengan data rata-rata komite audit periode tahun 2014-2018 sebanyak 3,6. Kenaikan jumlah komite audit Bank Umum Syariah (BUS) juga sejalan dengan semakin singkatnya total rata-rata *audit report lag* periode tahun 2014-2018. Tahun 2014 rata-rata *audit report lag* 61,2 dan pada tahun 2018 menurun ke 48,4. Hal inilah yang membuktikan bahwa sedikit banyaknya komite audit berpengaruh terhadap lama dan singkatnya *audit report lag*.

Diterimanya uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan banyak sedikitnya jumlah komite audit yang dimiliki oleh bank syariah berpengaruh terhadap cepatnya waktu audit. Karena menurut Muhammad Rizal Saragih (2018), bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka *audit report lag* yang dialami semakin singkat, *audit*

report lag dipengaruhi oleh komite audit.⁵⁸ Sehingga komite audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit report lag*.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Nur Apriyani (2015) yang menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.⁵⁹

2. Pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag*

Hasil uji regresi untuk variabel komisaris independen memiliki koefisien 9,917 bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin singkat *audit report lag* pada oleh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Sedangkan berdasarkan uji t memiliki nilai t_{hitung} 2,822 > t_{tabel} 2,002 dengan nilai sig 0,007 < α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima sehingga komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁵⁸ Muhammad Rizal Saragih, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas Dan Komite Audit Terhadap Audit report lag”, *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2, (2018), 354

⁵⁹ Nurul Nur Apriyani “Pengaruh Solvabilitas, Opini Auditor, Ukuran Kap, Dan Komite Audit Terhadap Audit report lag”, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 12 (2015), 176

Komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag* karena menurut data riil total rata-rata komisaris independen periode tahun 2014-2018 mengalami kenaikan, hal ini ditunjukkan dengan data rata-rata komisaris independen periode tahun 2014-2018 sebanyak 3,7. Kenaikan jumlah komisaris independen Bank Umum Syariah juga sejalan dengan semakin singkatnya total rata-rata *audit report lag* periode tahun 2014-2018. Tahun 2014 rata-rata *audit report lag* 61,2 dan pada tahun 2018 menurun ke 48,4. Hal inilah yang membuktikan bahwa sedikit banyaknya komisaris independen berpengaruh terhadap lama dan singkatnya *audit report lag*.

Diterimanya uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan banyak sedikitnya jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh bank syariah berpengaruh terhadap cepat lamanya waktu audit. Karena menurut Menurut Yenny Dwi Handayani (2016), pengawasan dari dewan komisaris independen membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan manajemen sehingga luas dan waktu pekerjaan audit dapat berkurang.⁶⁰ Sehingga komisaris independen merupakan salah satu faktor

⁶⁰Yenny Dwi Handayani, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Auditor Tenure, Auditor Spesialisasi Industri Terhadap Auditor Report Lags (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2014)", *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 2, (2016), 252

yang mempengaruhi *audit report lag*. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Yenny Dwi Handayani (2016), yang menunjukkan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*.⁶¹

3. Pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag*

Hasil uji F untuk komite audit dan komisaris independen nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $8,340 > 3,20$ dan nilai sig $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Sehingga komite audit dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Diterimanya hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jika komite audit dan komisaris independen mengalami peningkatan secara bersama-sama maka bank akan menyelesaikannya dengan tepat waktu dalam proses pengauditannya. Karena menurut Muhammad Faishal dan P.Basuki Hadiprajitno (2015), faktor yang mempengaruhi *audit report lag* salah satunya adalah Komisaris Independen, bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan tercipta monitoring yang

⁶¹ Ibid., 253

lebih efektif pada manajerial.⁶² Sedangkan menurut Siti Akhrani Isnania (2018), faktor yang mempengaruhi *audit report lag* adalah komite audit, karena dinyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit maka *audit report lag* yang dialami semakin pendek.⁶³

Selain itu, berpengaruhnya komite audit dan komisaris independen secara bersama-sama terhadap *audit report lag* di dukung oleh nilai koefisien determinasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,226 atau 22,6% Sehingga presentase kontribusi pengaruh dana komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* sebesar 22,6%. Sedangkan untuk sisanya 77,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.



⁶²Muhammad Faishal, P.Basuki Hadiprajitno, “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governanceterhadap Audit Report Lag”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, ISSN(Online): 2337-3806, 2, (2015), 2

⁶³ Siti Akhrani Isnania, “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report”, 41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

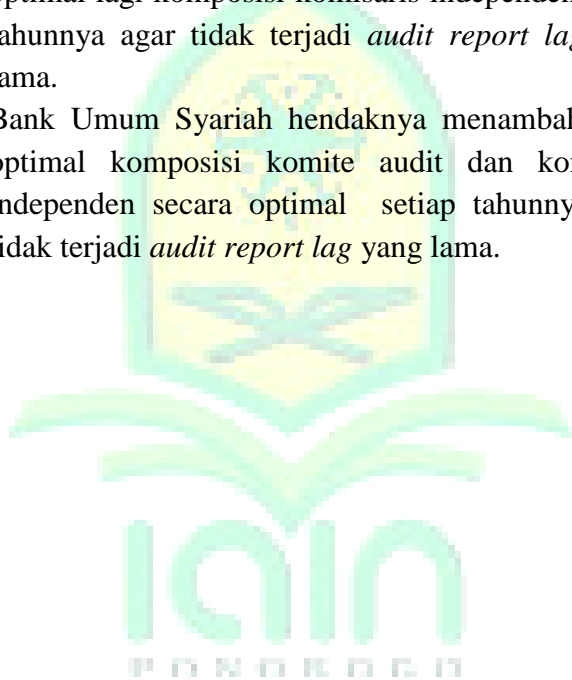
Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengaruh Komite Audit dan Komisaris Independen Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah komite audit berpengaruh terhadap singkatnya waktu *audit report lag*.
2. Komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap singkatnya waktu *audit report lag*.
3. Komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018, dengan presentase kontribusi pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *audit report lag* sebesar 22,6%. Sedangkan untuk sisanya 77,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah hendaknya menambah lebih optimal lagi komposisi komite audit setiap tahunnya agar tidak terjadi *audit report lag* yang lama.
2. Bank Umum Syariah hendaknya menambah lebih optimal lagi komposisi komisaris independen setiap tahunnya agar tidak terjadi *audit report lag* yang lama.
3. Bank Umum Syariah hendaknya menambah lebih optimal komposisi komite audit dan komisaris independen secara optimal setiap tahunnya agar tidak terjadi *audit report lag* yang lama.



DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Depok:Pena Pundi Aksara, 2008), 601
- Gunawan, Imam. *Pengantar Statistika Inferensial*. .Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 1997
- Sangaji, Etta Mamang Sopiah. *Metodologi Penelitian*.Yogjakarta:CV.Andi Offset, 2010
- Setyadharma, Adryan. *Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 16.0*. .Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2010
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* .Bandung: PT. Refika Aditama, 2015
- Somantri, Ating. *Sambas Ali Muhidin. Aplikasi Statistika Dalam Penelitian* .Bandung:CV.Pustaka Setia, 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D*.Bandung:Alfabeta, 2017
- . *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung : Alfabeta. 2013. 12

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Tindakan.* Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.

Sujarweni V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* .Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015

Suliyanto. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS.* Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2011.

Tugiman, Hiro. *Komite Audit.* Bandung:PT.Eresco Anggota IKAPI,

Widyaningrum, Retno. *Statistika.* .Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015

Wijaya, Tony. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS.* Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2009.

DAFTAR JURNAL

Abadi, Muhammad Gilang "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit delay Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016." *Karya Ilmiah.* Jambi: Universitas Jambi, 2017

Adelia Pratiwi, Dewa Ayu,. Ketut Muliarta. "Pengaruh Financial Distress. Ukuran Perusahaan. dan Audit delay Terhadap Pergantian Auditor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.* ISSN: 2302-8556. 2, 2019

Akhrani Isnania, Siti. "Pengaruh Komite Audit. Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report". *Akuntansi.* ISSN:24606561, 2018

- Angruningrum, Silvia Made Gede Wirakusuma. "Pengaruh Profitabilitas. Leverage. Kompleksitas Operasi. Reputasi Kap Dan Komite Audit Pada Audit delay". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556, 2013
- Apriyani, Nurul Nur "Pengaruh Solvabilitas. Opini Auditor. Ukuran Kap. Dan Komite Audit Terhadap Audit Delay". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 12, 2015
- Budhiartha, Aryaningsih. "Pengaruh Total Aset. Tingkat Solvabilitas dan Opini Audit pada Audit Delay". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 7, 2014
- Cahya Gunarsa, I Gede Aditya, Igam Asri Dwija Putri. "Pengaruh Komite Audit. Independensi komite Audit. Dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag Di Perusahaan Manufaktur".
- Candra, Ali Rasyidi .Widya Susanti. "Pengaruh Reputasi Kap. Opini Audit Dan Komite Audit Terhadap Audit delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013- 2015". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. 3, 2017
- Dwi Jayanti, Fitri. "Pengaruh ukuran perusahaan. kualitas audit dan profitabilitas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan". *Jurnal Akuntansi*. 1, 2018
- Dwi, Handayani Yenny. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen. Auditor Tenure. Auditor Spesialisasi Ind ustri Terhadap Auditor Report Lags .Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2014.". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. 2, 2016

- Ekha Mahendra, Edwardus Randy, Siti Mutmainah. "Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Informasi Perusahaan Melalui Internet". *Diponegoro Journal Of Accounting*. ISSN .online.: 2337-3806, 2013
- Fiatmoko, Arizal Latif, Anisykurlillah Indah. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit delay pada Perusahaan Perbankan." *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765 AAJ 4, 2015
- Firmansyah, Dudi. "Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba .Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013.". *e- Proceeding of Management*. ISSN : 2355-9357. 2, 2016
- Isnania, Siti Akhrani "Pengaruh Komite Audit. Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report". *Akuntansi*. ISSN:24606561, 2018
- Joy, Jasset. Nurul Fachriyah, "Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Report Lag", *Jurnal Akuntansi*, 2018
- Ketut Dian, Puspitasari, Latrin Made Yeni. "Pengaruh Ukuran Perusahaan. Anak Perusahaan. Leverage. dan Ukuran KAP terhadap Audit delay." *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556, 2014
- Khoirul Anam, Mohammad. "Determinan yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Ilmu Akuntansi*. 1, 2017

Lubis, Reza Hanafi. "Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit delay pada Perusahaan LQ 45". *Jurnal Akuntansi dan Pembelajaran*. ISSN: 23017384. 2, 2019

Novalia, Fitri, Marsellisa Nindito. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Economic Value Added Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan". *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. 2, 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 /PJOK.03. 2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pratiwi, Ayu Razni. " Pengaruh Reputasi Kapdan Komite Audit Terhadap Audit delay .Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016." *Akuntansi*. ISSN: 2460-6561. 2, 2018

Puspita, Ni Luh Sari Widhiyani. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Operasi, Solvabilitas, Dan Komite Audit Pada Audit". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556. 12, 2015

Puspitasari, Ketut Dian, Latrini. Made Yeni. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage, dan Ukuran KAP terhadap Audit delay." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556, 2014

Ramadhani, Khalida Nurdiana. "Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Opini Audit dan Reputasi Kantor Akuntansi Publik Terhadap Audit delay ada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Skripsi*. Bandung: Universitas Katholik Parahrayang, 2018

- Rizal Saragih, Muhammad. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas Dan Komite Audit Terhadap Audit Delay". *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 2, 2018
- Rizkyllah, Permana. "Pengaruh Opini Audit, Komite Audit, Dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2016". *Karya Ilmiah*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2018
- Sunarsih, Ni Made. "Pengaruh kualitas Auditor, Jumlah Komite Audit Dan Pendidikan Ketua Komite Audit Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Volume*. ISSN : 2528- 1216. 2, 2017
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Utami, Wiwik. "Analisis Determinan Audit Delay Kajian Empiris Di Bursa Efek Jakarta". *Buletin*. 9, 2006
- Widyati, Maria Fransisca. "Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan". *Jurnal Ilmu Manajemen*. 1, 2013

DAFTAR WEB

- Bank BJB Syariah. Annual. www.bankvictoriasyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 21.00.
- Bank BJB Syariah. Annual Report. www.bjbsyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. Jam 20.45.
- Bank Bukopin Syariah. Annual Report www.syariahbukopin.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. Jam 20.25.
- Bank Mega Syariah. Annual Report. www.megasyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 19.45.
- Bank Muamalat. Annual Report. www.bankmuamalat.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 09.30.
- Bank Panin Syariah. Annual Report. www.paninbanksyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 20.15.
- Bank Syariah Mandiri. Annual Report. www.syariahmandiri.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 20.00
- Bank Umum Syariah Yang Memiliki Audit Delay Panjang Adalah Bank Muamalat 150 hari pada tahun 2015. Bank BTPN 96 Hari pada tahun 2014. BRIS 90 Hari pada tahun 2018
- BCA Syariah. Annual Report. www.bcasyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. 19.00.

BNI Syariah. Annual Report. www.bnisyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 18.53

BRI Syariah. Annual Report. www.brisyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 9.15.

BTPN Syariah. Annual Report. www.btpnsyariah.co.id. diakses pada tanggal 2 Januari 2020 jam 19.30.

Maybank Syariah. Annual Report. www.maybanksyariah.co.id. diakses pada tanggal 20 Januari 2020. jam 20.20.

